

## Sambut Imlek, Wihara Dharma Jaya Pasar Baru Dipercantik

JAKARTA (IM) - Wihara Dharma Jaya (Sin Tek Bio), Pasar Baru, Jakarta Pusat telah mempersiapkan keperluan jelang Tahun Baru Imlek 2574 yang jatuh pada tanggal 22 Januari 2023 mendatang.

Pantauan langsung di lapangan, terlihat Wihara Dharma Jaya telah memasang banyak dupa di dalam kawasan ini.

Selain itu, gantungan lampion berwarna merah dengan tulisan berwarna emas juga menghiasi bagian dalam dan luar Wihara ini.

Tampak juga pengurus terus menjaga lilin dan dupa di dalam Wihara agar terus menyala, dalam menyambut Imlek Tahun Kelinci Emas ini.

Ketua Wihara Dharma Jaya, Santoso Witoyo menjelaskan, pihaknya sudah mempersiapkan beberapa lilin, dupa, serta lampu minyak dalam menyambut Imlek tahun ini.

"Lilinnya, hionya, pesanan semua. Lampu

minyak (juga)," ujarnya saat ditemui di lokasi, Minggu (15/1).

Santoso menuturkan, persiapan Imlek tahun ini sama seperti saat pandemi Covid-19. Perbedaannya, banyak jemaat yang tidak sembahyang langsung di Wihara.

"Sama aja cuma waktu Covid kemarin banyak mereka (jemaat) yang ngga datang, tapi lilinnya, lampu minyaknya, hionya tetap nyala," terangnya.

Ia menambahkan, perkiraan kuota jemaat yang datang pada Imlek tahun ini dapat mencapai angka 800 orang pada tanggal 21 Januari, serta 700 orang saat 22 Januari-nya.

Diketahui, Tahun Baru Imlek 2574 ini akan jatuh pada Minggu 22 Januari 2023.

"Itu dari tanggal 21 (Januari) nanti, pagi sampai malam bisa kurang lebih 800 orang," katanya.

"Kemungkinan kita 700 orang pada tanggal 22 Januari-nya," pungkasnya. ● yan

# 4 | Metropolis

FOTO: ANT



## KAMPANYE MENJAGA KEBERSIHAN

### DI TEMPAT UMUM

Relawan dari Komunitas Operasi Semut memungut sampah sambil membawa poster imbauan menjaga kebersihan saat CFD (Car Free Day) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (15/1). Kegiatan memungut sampah seperti sampah organik dan non organik hingga puntung rokok yang bertujuan untuk mengajak warga menjaga kebersihan di tempat umum.

## SEBELUM TERAPKAN ERP

# Pemprov DKI Diminta Tingkatkan Layanan Transportasi Umum

Salah satu langkah efektif mengurangi kemacetan di Jakarta adalah dengan menjadikan pengguna kendaraan bermotor pribadi menjadi pengguna transportasi umum.

JAKARTA (IM) - Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli menilai penerapan sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) bisa mengurangi kemacetan di sejumlah titik di Ibu Kota. Untuk diketahui, peraturan soal sistem ERP tercantum dalam rancangan peraturan daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PLLE).

"Pada prinsipnya, (sistem ERP) bagus ya, itu salah satu cara untuk mengurangi kemacetan dengan memanfaatkan teknologi. Jadi, jalan-jalan

yang macet itu nanti dikurangi (pengguna jalannya)," sebut Taufik melalui sambungan telepon, Minggu (15/1).

Berdasarkan manfaat itu, katanya, Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta mendukung penerapan ERP di Ibu Kota.

Namun, lanjut Taufik, terdapat sejumlah catatan bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta jika hendak menerapkan ERP. Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta harus memperbaiki layanan transportasi umum jika memang hendak menerapkan ERP. Layanan transportasi umum diper-

baik untuk warga yang nantinya memilih untuk tak menggunakan kendaraan pribadi saat ERP diterapkan.

"Fasilitas kendaraan umum itu harus benar-benar dibuat untuk orang yang tidak bisa jalan di situ," kata Taufik.

Ia menyatakan, salah satu langkah efektif mengurangi kemacetan adalah dengan menjadikan pengguna kendaraan bermotor pribadi menjadi pengguna transportasi umum.

Langkah ini, menurut Taufik, disebut sebagai pull strategi. Sementara itu, penerapan ERP disebut sebagai push strategi.

Dengan demikian, warga ditarik menjadi pengguna transportasi umum lantaran ERP diterapkan.

"Kan ada istilahnya pull strategi, menarik mereka semua untuk mau naik Transjakarta, angkot, MRT, atau

LRT," urainya.

Di sisi lain, Taufik meyakini penerapan ERP bisa jadi justru memindahkan kemacetan di jalan lain di Ibu Kota yang tak menerapkan jalan berbayar elektronik.

Namun, ia menilai hal itu justru menjadikan warga semakin yakin untuk menggunakan transportasi umum.

"Mau tidak mau yang terbaik nanti adalah memakai kendaraan umum," sebut

Taufik.

Untuk diketahui, berdasarkan Raperda PLLE, ERP akan diterapkan setiap hari mulai pukul 05.00 WIB-22.00 WIB.

Usulan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, pengendara kendaraan yang melewati ERP akan dikenakan tarif Rp 5.000-Rp 19.000.

Dalam Raperda PLLE, ERP akan diterapkan di 25 ruas jalan di Ibu Kota. ● yan

## Pemprov DKI Pangkas Anggaran Kesehatan, DPRD Berang

JAKARTA (IM) - Keputusan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi DKI Jakarta yang nekat memangkas anggaran kesehatan secara sepihak sebesar Rp 220 miliar membuat legislator Kebon Sirih khususnya Komisi E DPRD DKI Jakarta berang.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Basri Baco menentang keras langkah TAPD yang nekat memangkas anggaran kesehatan, padahal alokasi anggaran itu sudah disetujui di Komisi E DPRD DKI Jakarta pada 2022 lalu.

Pasalnya, dikatakan Baco, anggaran tersebut sangat berguna untuk pelayanan masyarakat Jakarta di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

"Ini kenapa anggaran kesehatan di Dinas Kesehatan terkena pangkas sampai Rp 220 miliar. Anggaran ini padahal untuk pelayanan masyarakat, ini darsak (darurat dan mendesak) lho," kata Baco dalam keterangannya dikutip, Minggu (15/1).

Baco yang juga ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta ini turut mengingatkan, anggota dewan memiliki tiga fungsi di Parlemen Kebon Sirih, yaitu penganggaran, pengawasan dan legislasi. Baco merasa, fungsi penganggaran Komisi E DPRD DKI Jakarta buntut insiden ini menjadi gugur.

"Ini buat apa kita capek-capek rapat sampai malam bahas anggaran, tahu-tahu alokasi anggaran kesehatan dipangkas Rp 220 miliar," ucapnya.

Kemudian, Baco juga mempertanyakan sikap Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta yang cenderung pasif mempertahankan alokasi anggaran kesehatan di rumah sakit. Sikap ini jauh berbeda dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta yang mampu mempertahankan alokasi pembangunan gelanggang olahraga remaja (GOR), padahal proyek itu dianggap tidak darsak.

"Kenapa Rp 200 miliar ini semua dari Dinkes, kalau dasarnya kegiatan ini tidak ada di RKPD (rencana kerja pemerintah daerah) kenapa yang lain, yang tidak ada di RKPD masih dipertahankan," ujar Baco.

"Kenapa nggak sebagian

dipangkas di Dinkes, sebagian dari yang lain supaya 'operasi' penghapusan anggaran itu nggak kelihatan mencolok," tanyanya menambahkan.

Diketahui, alokasi belanja tidak terduga (BTT) Pemprov DKI Jakarta tahun 2023 naik Rp 220,1 miliar menjadi Rp 868,6 miliar dari yang sudah ditetapkan. Awalnya eksekutif dan legislatif menyepakati nilai BTT tahun 2023 sebesar Rp 648,5 miliar.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Brata menyampaikan, penambahan anggaran untuk BTT akan diambil dari program-program yang tidak tercantum dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Termasuk, kata dia, dari kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) rancangan APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp 220,8 miliar.

"Setelah kami sisir dan lihat kembali memang ada kegiatan baru di belanja modal yang tidak ada dalam RKPD dan KUA-PPAS. Itu akan kami alihkan ke belanja tidak terduga," kata Michael.

Dari sejumlah pergeseran kegiatan anggaran, Pemprov DKI Jakarta mendapatkan total penambahan sebesar Rp 285,6 miliar. Namun terpotong Rp 65,5 miliar untuk program menunjang pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2023 sesuai amanat undang-undang yang terdiri dari pemenuhan alokasi anggaran dana alokasi khusus (DAK) untuk bantuan operasional sekolah (BOS).

Lalu, bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) PAUD dan BOP Kesetaraan sesuai surat Kepala Dinas Pendidikan sebesar Rp 25,5 miliar dan pemenuhan alokasi anggaran Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah (LP3KD) sebesar Rp 40 miliar.

"Total yang bisa dimasukkan dalam BTT awalnya sebesar Rp 285,6 miliar dan dipotong Rp 65,5 miliar. Jadi hanya bertambah Rp 220,1 miliar, sehingga total BTT menjadi Rp 868,6 miliar. Postur (APBD) tidak berubah, hanya komposisi belanjanya saja yang berubah," terang Michael. ● yan



## DELMAN TERBATAS BEROPERASI DI KAWASAN MONAS

Pengunjung menaiki salah satu delman wisata di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (15/1). Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan delman tidak dilarang digunakan di kawasan Monas namun pengoperasiannya dibatasi pada akhir pekan, yakni Sabtu dan Minggu.

## Petugas DLH OTT Pembuang Sampah, Pelaku Didenda Rp 400 Ribu

JAKARTA (IM) - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan. OTT ini dilakukan di kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Jl. Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (15/1).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan bahwa ia mendapatkan pesan dari Penjabat Gubernur, Heru Budi Hartono, supaya kegiatan Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Kebersihan tidak kendor dan konsisten dilakukan.

"Kami beserta jajaran menindaklanjuti pesan Pak Pj Gubernur dengan mengerahkan petugas lebih banyak dari pekan-pekan sebelumnya," ungkap Asep dalam keterangan tertulis, Minggu (15/1).

Setelah dilaksanakan pengawasan dan penindakan pelanggaran bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan, terdapat 6 pelanggar yang terbukti membuang sampah sembarangan.

Pada hari ini terdapat 5 pelanggar yang dikenakan denda uang paksa dengan total denda Rp 400.000 dan 1 pelanggar yang dijatuhi sanksi sosial melakukan pengutan sampah di lokasi.

Jumlah ini lebih sedikit dari HBKB sebelumnya.

"Mudah-mudahan

ini bukti warga Jakarta sudah makin sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan," lanjut Asep.

Selain secara konvensional, OTT juga dilakukan dengan bantuan drone bersinergi dengan Diskominfotik.

Petugas dari DLH DKI Jakarta juga berkeliling sepanjang ruas HBKB mengimbau masyarakat tetap menjaga kebersihan.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta menempatkan 7 (tujuh) buah Posko sepanjang Jl. Sudirman-Thamrin yang berlokasi, antara lain di depan Hotel Indonesia Kempinski, Jl. Sumenep, depan Gedung Jaya, depan Gedung BNI 1946, depan Gedung Chase Plaza, depan Gedung Graha Niaga dan depan Gedung FX Sudirman.

Selain di lokasi HBKB Tingkat Provinsi, kegiatan ini juga dilaksanakan di 5 (lima) lokasi HBKB Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta.

Sesuai dengan Perda No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah disampaikan, "bahwa Gubernur dapat memberikan sanksi administratif berupa uang paksa kepada setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang, menumpuk sampah dan/atau bangkai binatang ke sungai/kali/kanal, waduk, situ, saluran air limbah, di jalan, taman, atau tempat umum dan dikenakan uang paksa paling banyak Rp. 500.000,00". ● yan

## Targetkan 100 Persen Anak di Depok Pemilik KIA pada 2026

DEPOK (IM) - Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Depok, Nuraeni Widayati menargetkan 100 persen anak di Kota Depok memiliki kartu identitas anak (KIA) pada tahun 2026.

"Target kami tahun 2026 semua anak Depok 100 persen memiliki KIA. Hingga tahun 2022 sudah mencapai 60,11 persen anak Depok yang memiliki anak KIA," kata Nuraeni di Depok, Minggu (15/1).

Ia menjelaskan dari 84 ribu KIA yang diterbitkan pada tahun 2022, hampir 35 ribu di antaranya berasal dari inovasi layanan komunitas

Lawas Bucin yang merupakan strategi percepatan kepemilikan KIA yang paling jitu melalui kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai komunitas. Seperti Posyandu, rumah sakit

atau klinik, dan sekolah.

"Alhamdulillah, semoga semakin banyak anak yang memiliki KIA dan semakin banyak badan usaha yang bekerja sama dengan Dukcapil memberikan promo harga produk bagi pemilik KIA," ujarnya.

Nuraeni menyampaikan kiat Kota Depok dalam percepatan dokumen kependudukan KIA. "Di Kota Depok percepatan KIA terus dilakukan. Baik melalui Geyar Layanan Dukcapil tingkat kecamatan se-Kota Depok (Gladis Tiktok) dan pelayanan Silondo Bermula yang membuatnya sudah secara online," terangnya.

Dia menambahkan, bahkan Dukcapil Depok juga bekerja sama dengan dengan berbagai stakeholder untuk percepatan KIA. Misalnya, dengan perusahaan makanan

cepat saji dan sebagainya untuk memberikan diskon kepada anak yang memiliki KIA.

Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Catatan Sipil, Kemendagri, Andi Kriarmani mengapresiasi upaya Dukcapil Depok dalam percepatan KIA. Langkah-langkah yang dilakukan Kota Depok bisa menjadi contoh bagi wilayah lain.

Program Dukcapil Menyapa Masyarakat (DMM) yang digelar Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bermanfaat sekali, banyak yang bisa diambil dalam upaya percepatan KIA.

"Salah satunya oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Depok, Nuraeni yang menjalin kerja sama dengan pengusaha agar memberikan banyak benefit kepada masyarakat," ujarnya. ● yan



## WISATA JEMBATAN APUNG SITU RAWA KALONG DEPOK

Sejumlah wisatawan melintas di jembatan apung Situ Rawa Kalong, Depok, Minggu (15/1). Jembatan apung yang didesain mengikuti goyangan ombak atau arus air tersebut menjadi daya tarik khusus dari Situ Rawa Kalong dan sekaligus menjadikannya sebagai area unik untuk para pegiat media sosial serta destinasi wisata gratis di Depok.